

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, mengenai Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung secara keseluruhan telah melakukan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan sangat baik. Berdasarkan perhitungan akumulasi tanggapan responden mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung yaitu sebesar 74,76%, yang termasuk kriteria sangat baik dilihat dari jawaban responden tertinggi sebesar 125 bahwa pernyataan misi sesuai dengan visi instansi pemerintah dan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan pemerintah daerah yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung secara keseluruhan telah melakukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi, *output* dan *outcome*. Berdasarkan perhitungan akumulasi tanggapan responden mengenai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung yaitu sebesar 72,28%, yang termasuk kriteria baik dilihat dari jawaban responden tertinggi sebesar 126 bahwa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

3. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dan didukung dengan data melalui uji statistik dapat diketahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 93%, ini artinya penerapan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh sebesar 93% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 7% dapat dipengaruhi oleh faktor lain diluar penerapan anggaran berbasis kinerja yang tidak diteliti oleh peneliti.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penerapan anggaran berbasis kinerja yang sudah sesuai dengan prosedur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung agar di pertahankan dengan cara pernyataan misi harus sesuai dengan visi instansi pemerintah dan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan pemerintah daerah yang dibuat harus sesuai dengan SAP yang

terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan.

2. Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pencapaian *output* dan *outcome* yang sudah baik agar dipertahankan dengan cara menggunakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Untuk peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain selain penerapan anggaran berbasis kinerja yang dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, atau mencari objek penelitian lain untuk mendapat gambaran yang berbeda misalnya penyusunan anggaran berbasis kinerja.

